

**POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

Ainul Hamdi
NPP. 29.0004

*Asdaf Aceh Utara, Provinsi Aceh
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: ainulhamdi20@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Education teaches things related to science, morals, manners, manners and all aspects used in living this life. Law No.20 of 2003 concerning the National Education System which regulates the mechanism and guarantee of education in Indonesia. During its implementation there were problems encountered, namely the use of School Operational Assistance (BOS) funds that were not optimal. **Purpose :** This study aims to identify and analyze the supporting and inhibiting factors, as well as the efforts made to improve the politics of implementing the BOS program. **Method:** used is descriptive qualitative research method with inductive approach. Data was collected through interviews with informants, observations, and documentation. The analysis technique is carried out in 3 (three) stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results and Findings:** this study shows that the politics of implementing the BOS program has not been effective in implementing the BOS program, this is because there are still indicators in formal institutions that have not been met, namely there is a discrepancy with the implementation of government programs that are not in line with the expectations of the community. **Conclusions and Suggestions:** The competence of Human Resources (HR) that is owned is also not in accordance with the field it occupies and does not have more skills, so it is necessary to make efforts to improve the competence of HR through training for officers who are given the task of managing BOS funds. Of the several measures of effectiveness, only a few meet the effective measures. This is because there are problems or obstacles so that the implementation of the BOS program has not been able to run properly, resulting in the distribution of BOS not being on time and on target. It is recommended to the Education Office to be more active in responding to the problems faced by the BOS fund manager.

Keywords: *Politics, Implementation, Program, School Operational Assistance (BOS)*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendidikan mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, moral, sopan santun, tata krama dan seluruh aspek-aspek yang digunakan dalam menjalani kehidupan ini. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang mekanisme dan keterjaminan pendidikan di Indonesia. Selama pelaksanaannya terdapat permasalahan yang ditemui yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak maksimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan politik implementasi program BOS. **Metode :** yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil dan Temuan :** penelitian ini menunjukkan bahwa politik implementasi program BOS belum efektif dalam pengimplemantasian program BOS, hal ini disebabkan masih terdapat indikator-indikator dalam lembaga formal yang belum terpenuhi, yaitu terdapat ketidaksesuaian terhadap implementasi program pemerintah yang tidak selaras dengan harapannya Masyarakat. **Kesimpulan dan Saran :** Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki juga belum sesuai dengan bidang yang ditempatinya dan belum memiliki skill yang lebih, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan kepada petugas yang diberikan tugas sebagai pengelola dana BOS. Dari beberapa ukuran efektivitas hanya beberapa saja yang memenuhi ukuran efektif hal ini disebabkan karena terdapat masalah atau hambatan-hambatan sehingga implementasi program BOS belum dapat berjalan dengan semestinya, sehingga mengakibatkan penyaluran BOS tidak tepat waktu dan sasaran. Kepada Dinas Pendidikan disarankan agar lebih aktif untuk merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak pengelola dana BOS.

Kata kunci : *Politik, Implementasi, Program, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, moral, sopan santun, tata krama dan seluruh aspek-aspek yang digunakan dalam menjalani kehidupan ini. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang mekanisme dan keterjaminan pendidikan di Indonesia. Pada pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berumur 6 tahun dapat ikut serta pada program wajib belajar”. Selanjutnya, di ayat (2) disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memberikan jaminan tersedianya wajib belajar minimum dalam tingkat Pendidikan Dasar dengan tanpa mengeluarkan biaya”. Kemudian, ayat (3) menyebutkan bahwa “Wajib belajar ialah tanggungjawab negara yang disediakan oleh badan pendidikan pemerintahan, masyarakat dan pemerintah daerah”. Dalam rangka memberikan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah dalam mengayomi dan melayani warga negara Indonesia, sehingga membutuhkan aksi nyata dalam bidang pendidikan agar seluruh penduduk Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Maka dengan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni dengan terdapatnya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memiliki tujuan sebagai mana yang tertera pada Permendiknas Nomor 37 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang menyatakan bahwa agar dapat meringankan biaya pendidikan bagi siswa miskin dari berbagai biaya dalam bentuk apapun, baik swasta ataupun di sekolah negeri, terkecuali sekolah percontohan dengan taraf internasional, dan peningkatan kualitas pendidikan pada akhir wajib belajar 9 tahun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia meliputi biaya bahan atau peralatan yang digunakan dalam pendidikan, serta biaya tidak hidup seperti listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur, pembayaran, transportasi, konsumsi, dan pajak. Namun, ada berbagai jenis investasi pembiayaan dan karyawan yang diizinkan untuk didanai menggunakan uang BOS. Fenomena saat ini diketahui bahwa Kabupaten Aceh Utara salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang di berikan dana BOS oleh pemerintah. Dana BOS merupakan salah satu dari beberapa kegiatan ataupun program kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang berlangsung sejak tahun 2003. Program tersebut dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah pertama. Dalam meningkatkan penilaian terhadap kualitas pelayanan penyaluran dana BOS di Kabupaten Aceh Utara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melaksanakan penyaluran dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Bantuan Keuangan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021 dengan belum dilaksanakan. Dana BOS disalurkan di setiap sekolah merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dimana pembiayaannya secara langsung diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan berdasar kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Dalam prakteknya program Dana BOS memiliki hambatan dan permasalahan. Sebagai contoh pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada di Kabupaten Aceh Utara, tidak semua SD di Kabupaten Aceh Utara dapat menerima Dana BOS. Selain itu, keterbukaan dana BOS pada publik belum terlalu tinggi, perihal itu dapat ditinjau dari pihak sekolah yang belum menyampaikan informasi dan keberhasilan perihal pengelolaan BOS selama ini kepada masyarakat. Penggunaan dan penyaluran dana BOS masih terdapat bermacam masalah baik pada penggunaan dan penyalurannya. Permasalahan tersebut berkenaan efektifitas dan efisiensi penggunaan yang nantinya akan menghalangi sasaran dana BOS tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi permasalahan mengenai manajemen dan tata kelola dana BOS di SD Negeri yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Program BOS yang dilakukan oleh otoritas lokal berdasarkan standar yang memenuhi persyaratan. Hal ini berkemungkinan karena stabilitas lingkungan, tekanan lingkungan sosial politik di wilayah ini, mempengaruhi kerja institusi. Setiap sekolah tentunya akan menerapkan program BOS masing-masing, yang telah diterimanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, sehingga memiliki aturan yang berbeda di sekolah yang berbeda akan meningkatkan proses pembelajaran. Langkah-langkah dukungan faktor juga dapat meningkatkan pembelajaran. Hal ini terlihat dari program dana BOS yang diterima, terdapat kendala dan permasalahan di beberapa sekolah, seperti keterlambatan transfer dana BOS, sehingga dana BOS tidak tersalurkan tepat waktu sebagaimana mestinya. Selain itu, masih terdapat kekurangan buku ajar untuk siswa, terbukti dengan banyaknya siswa yang membeli buku ajar yang seharusnya mereka terima secara cuma-cuma atau pinjam dari sekolah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Politik Implementasi Program BOS Di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh merupakan cara untuk mengetahui bagaimana jalannya program dana BOS serta bagaimana kendala yang terjadi dilapangan. Berdasarkan fakta yang ada memang setiap tahunnya dana BOS berjalan dengan baik tetapi kenyataan dilapangan masih terdapat sekolah yang belum mampu menjalankan program BOS secara optimal, dimana ada sekolah yang mengabaikan tentang kebutuhan untuk memberikan pendidikan, yang meliputi gaji guru honorer, pelatihan guru, pembelian buku pelajaran dan alat, kegiatan ekstrakurikuler, alat tulis, pengawasan pedagogis dan manajemen pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang baik. Artinya penggunaan dana darurat sekolah sekurang-kurangnya menyangkut empat hal, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama Hasil Penelitian Sucika, Suprpta, 2018, implementasi dana BOS sebagai upaya pemerataan pendidikan di SDN 1 Panarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng

mendiskripsikan Implementasi alokasi dana BOS berhasil berjalan sesuai dengan tujuan dan berjalan tepat sasaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta mampu mempengaruhi pemerataan pendidikan dengan adanya bantuan Tujuan penelitian ini Mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan dana BOS dalam pemerataan Pendidikan di SD Negeri 1 Panarukan Tahun 2016 Kedua Yaitu Hasil Penelitian Widyatmoko, Suyatmini, 2017, pengelolaan dana BOS di SDN Kemas 1 Surakarta dihasilkan Proses perencanaan komponen yang terlibat antara lain, kepala sekolah, bendahara sekolah, dewan guru dan komite sekolah, dimana proses perencanaan diawali dengan menyusun RKAS. Yang bertujuan Mengetahui pengelolaan dana BOS di SDN Kemas 1 Surakarta. Ketiga yaitu Hasil Penelitian Januwarso, 2017, implementasi program bantuan operasional sekolah pada SMPN di Kabupaten Bojonegoro, dihasilkan Pelaksanaan tahap persiapan program BOS telah berjalan dengan baik dan telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dengan sangat baik. Selanjutnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BOS telah dilakukan dengan baik dengan hasil masih ditemukannya masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program BOS. Akan tetapi, implementasi program BOS secara keseluruhan di SMPN di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik, yang bertujuan Mengetahui implementasi program bantuan operasional sekolah pada SMPN di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian keempat yaitu penelitian Widodo, Purnamasari, Wardani, Hidayah, Hasanah, 2020, implementasi kebijakan dana BOS di Kota Malang yang bertujuan Implementasi kebijakan dana BOS di Kota Malang, hasilnya Terdapat beberapa permasalahan kebijakan dana BOS, salah satunya masih banyaknya pihak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat atau wali siswa. Selanjutnya penelitian dari Helnikusdita, 2016, implementasi dana BOS pada SMAN 4 Seluma, yang bertujuan Mengetahui implementasi pengelolaan dana BOS pada SMAN 4 Seluma, yang menghasilkan Mendokumentasikan bahwa pelaksanaan dana BOS sesuai dan mengikuti prosedur serta pedoman teknis yang berlaku. Dan selanjutnya penelitian dari Anas, 2016, implementasi program dana BOS pada SMAN 1 Pasangkayu Kabupaten Mamuju, yang bertujuan Mengetahui implementasi program dana BOS pada SMAN 1 Pasangkayu Kabupaten Mamuju, yang menghasilkan Membuktikan bahwa aspek pengelolaan dana bos yang terdiri dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi telah terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir penelitian dari Hakim, Suhendar, 2020, Pengelolaan Dana BOS pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten yang bertujuan Mengetahui pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten yang menghasilkan Memberikan bukti bahwa pengelolaan dana BOS telah baik dan sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS, namun masih perlu perbaikan, walaupun sampel memiliki karakteristik yang berbeda, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan fasilitas BOS relatif sama.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung politik implementasi program BOS tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara serta untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan politik implementasi program BOS tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara.

II. METODE

Penelitian ini lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dibutuhkan data yang terbaru dan akurat mengenai Politik Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sedang berlangsung. Oleh karena itu metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek ukuran kualitas, menginterpretasikan fenomena atau gejala sosial yang diolah menjadi suatu data. Kualitas, nilai atau makna ini hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan dalam catatan lapangan, wawancara, percakapan, dokumentasi, perekaman, dan memo dari penulis sebagai instrumen dalam penelitian ini (Creswell & Poth, 2018:42)

Penelitian kualitatif menurut Creswell & Poth (2018:42) menyebutkan bahwa hal pertama yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah memulai dengan dugaan dan penggunaan kerangka interpretasi/teoritis yang menginformasikan masalah penelitian serta membahas makna yang dianggap individu atau kelompok sebagai masalah sosial atau manusia. Untuk mempelajari masalah ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang muncul untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan data terhadap yang diteliti penulis. Sejalan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan induktif, dapat diketahui induktif bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum untuk mengetahui telah sesuai dengan hukum, dalil atau teori yang ada. Induktif dimulai dari fakta yang diambil dari lapangan, dianalisis dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori atau hukum yang sesuai sehingga dapat disimpulkan. Pendekatan penelitian secara induktif yaitu mencari suatu informasi dari khusus ke umum, dengan membuat interpretasi dari informasi atau data yang ditemukan saat dilapangan dan penelitian yang akan di lakukan maka peneliti menggunakan kedua jenis sumber data tersebut baik data primer maupun data sekunder, karena data diperoleh peneliti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga artikel yang berhubungan dengan Program BOS di Kabupaten Aceh Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Pendukung Politik Implementasi Program BOS tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara

Menurut teori Helmke dan Levitsky (2004), yang menggunakan 2 dimensi yaitu :

3.1.1 Lembaga formal yang efektif

Lembaga formal dikatakan efektif yaitu apabila lembaga formal menjadi lembaga yang saling melengkapi dan akomodatif. Serta merupakan seperangkat lembaga yang memiliki aturan tertulis yang terbuka, dimana di dalamnya selain ditetapkan dasar ketentuan dan hukum konstitusional, juga ditegakkan tatanan serta norma dan aturan tertulis yang dijadikan dasar suatu tindakan yang sah.

a. Saling Melengkapi

Hasil kebijakan dicapai sesuai dengan tujuan awalnya, lembaga formal yang dimaksud dapat mengambil fungsi utama organisasi/program namun juga bisa dilengkapi dan didukung oleh lembaga informal. Lembaga informal yang ada berfungsi sebagai pengisi celah (saling melengkapi). yaitu faktor pendukung berjalanya dana BOS dengan baik dilakukan dengan sosialisasi penggunaan dana BOS, sosialisasi berbentuk penjelasan kepada warga sekolah secara tertulis disampaikan melalui majalah dinding ataupun sosialisasi yang disampaikan secara langsung ketika rapat sebagai bentuk transparansi dalam penggunaan dana BOS ,serta dengan adanya sosialisasi bimtek tersebut diharapkan dapat membantu serta mempermudah sekolah yang mendapatkan dana BOS untuk kelancaran semua kegiatan operasionalnya. Selain itu dengan adanya koordinasi antar instansi serta adanya dukungan dari semua pihak yang memberikan saran akan mempengaruhi keputusan sekolah dalam penggunaan dana BOS sehingga arah penggunaan dana BOS dapat terarah dan sesuai rencana yang diharapkan.

b. Akomodatif

Untuk mengatasi dampak sosial ekonomi, pemerintah telah menyiapkan dana yang dialokasikan untuk program-program sosial bagi masyarakat lapisan bawah di seluruh Indonesia. Implementasi program BOS harus memberikan aspek keadilan bagi masyarakat miskin. Hal ini bertujuan supaya masyarakat kelas bawah dapat melanjutkan sekolahnya dan tidak putus sekolah. Semua pemda hingga pemkot dan pemkab perlu mengacu data dari pusat yaitu DTKS sehingga tidak mengacu data sendiri-sendiri. Karena program-program ini penting bagi rakyat dan disimpulkan bahwa politik implementasi pada Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh melaksanakan program berdasarkan data yang sudah ada, dari data tersebut dapat tepat sasaran dan berjalan dengan efektif.

3.2 Faktor Penghambat Politik Implementasi Program BOS tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara

Dalam proses pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di SDN 16 Lhoksukon juga mengalami hal-hal yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan program BOS tersebut seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa salah satu yang dapat membuat suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik yaitu dikarenakan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah teknis. Hal ini dapat dibuktikan dimana dalam peraturan yang dimuat dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Sekolah tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan dana bantuan operasional tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti misalnya sekolah tidak diperbolehkan untuk melakukan perbaikan berat dan pembuatan gedung baru menggunakan dana BOS. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat untuk mencapai tujuan yang direncanakan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.

3.2.1 lembaga formal yang efektif

a. Pengganti

Politik implementasi program pemerintah perlu dikelola secara relevan dan efektif “yaitu dengan tujuan yang direncanakan semula benar-benar dicapai” untuk mewujudkan program layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua kalangan masyarakat. Namun dalam mewujudkan hal tersebut tidak semudah dan semulus yang direncanakan masih banyak pengaduan yang berasal dari masyarakat. Masih terdapat praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh beberapa orang dan tidak didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga yang seharusnya efektif menjadi tidak efektif. Faktor pengmabat lainnya yaitu pencairan dana BOS yang sering terjadi tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Serta belum terlibatnya semua pihak dalam penggunaan dana BOS, observasi penulis lakukan jika dilihat dari penggunaan dana BOS oleh sekolah harus didasari dari kesepakatan antara kepala sekolah, dengan komite sekolah, seharusnya komite sekolah sangat dibutuhkan dalam proses tersebut untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat serta sebagai perwakilan wali murid dalam pengawasan internal dalam pengelolaan anggaran.

b. Bersaing

Dalam penelitian ini tidak terdapat bukti-bukti yang mengarah ke penerimaan suap maupun hal-hal semacam, namun peneliti menemui adanya orang-orang yang terdaftar pada program penerimaan bantuan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kriteria yang ditetantukan. disimpulkan nampaknya pihak sekolah telah menginformasikan

penggunaan dana BOS dalam bentuk pelaporan hanya saja kurang optimal karena laporan hanya dalam bentuk laporan yang disampaikan di mading dan orant tua siswa juga kurang antusias terhadap perkembangan yang terjadi di sekolah sehingga tidak menutup kemungkinan *Missing Information* antara sekolah dan wali murid serta dari observasi peneliti lakukan masih terdapat ketidaksesuaian terhadap implementasi program pemerintah yang tidak selaras dengan harapannya Masyarakat.

3.3 Upaya untuk meningkatkan politik implementasi program BOS tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara

Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani hambatan-hambatan yang ada :

- a) **Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)**
Dalam hal ini sebagai suatu upaya adalah menyusun perencanaan kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam administrasi. Rencana merupakan serangkaian keputusan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Perencanaan yang baik hendaknya diarahkan pada tujuan (*Goald oriented*).
- b) **Organizing (Pengorganisasian)**
Setelah menyusun rencana, selanjutnya diperlukan penyusunan /pengelompokan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan yang akan dilaksanakan dalam rangka usaha kerja tersebut.” Perlu pengaturan, ada beberapa jenis kegiatan, dikelompokkelompokkan hubungan antara jenis kelompok masing-masing.
- c) **Antisipasi Penyalahgunaan Dana BOS**
Antisipasi merupakan tindakan yang mengusahaan agar penyalahgunaan dana BOS tidak terjadi, untuk penggunaan dana BOS sudah diatur petunjuk teknisnya didalam Permendikbud No 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Namun dalam pelaksanaannya sering kali mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dan keterlambatan dalam penyaluran dana BOS.
- d) **Controlling (Pengawasan)**
Controlling adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi apabila diperlukan supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana.” petugas yang diberi tugas sebagai pengelola BOS adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola BOS dengan latar belakang keguruan, sehingga kemampuan dalam mengelola administrasi dan keuangan belum sepenuhnya memiliki pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan
- e) **Evaluasi**
Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dan dapat memperoleh suatu informasi dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Hal inidisampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: “Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin terhadap semua sekolah dasar di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lhoksukon”.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini ditemukan kurangnya transparansi dalam penegelolaan dana BOS dan penggunaan dana BOS belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan peraturan dan yang ada. Serta belum terlibatnya semua pihak dalam pengelolaan dana BOS.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor pendukung ditinjau dari dimensi lembaga formal adanya Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tatacara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan, Terjalannya bentuk kerja sama yang baik dari pihak pengelolah dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan), motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan kualitas pendidikan, Dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga. Sedangkan Faktor penghambat ditinjau dari segi lembaga informal yaitu : waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, dan Dana bantuan operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh. Dan upaya untuk meningkatkan politik implementasi program BOS tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara yaitu : Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) , *Organizing* (Pengorganisasian), Antisipasi Penyalahgunaan Dana BOS, *Controlling* (Pengawasan), Evaluasi

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi dalam politik implementasi program dana BOS di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan kepada Kepada Komite Sekolah baik guru, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat disarankan untuk keterlibatannya dalam mengawasi pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah tersebut. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi-solusi penyelesaian masalah serta

kepada Dinas Pendidikan disarankan agar lebih aktif untuk merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak pengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adillah, G. (2016). Manajemen Keuangan Sekolah. *Manajer Pendidikan*, 10(4).
- Anas, A. (2016). Implementasi program dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*, 4(5).
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry Research Design*. Sage Publications, Inc.
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy*. Pearson Education.
- Fattah, Nanang. 2002. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy*.
- Hwang, K. S. (2013). *The impact of accountability and accountability management on performance at the street level*. Virginia Tech.
- Masruroh, & Fitriani, S. (2021). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Ypk Kesatuan Jakarta. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 551–562.

- Nurdin, usman. 2002. *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Mandiri Pustaka
- Sagala, Saeful. 2007. *Manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sudrajat, A. (2010). *Konsep dasar manajemen keuangan sekolah*. Retrieved from akhmadsudrajat.wordpress.com.
- Sulistyowati, I., & Darno, D. (2019). Pengaruh Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana Bos Terhadap Kinerja Keuangan di SMA Al-Islam Krian Sidoarjo. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 146–157.
- Supriyadi, D. (2004). *Manajemen pendidikan di sekolah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryana, D. (2008). *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Erlangga.
- Uwe Flick. (2018). Qualitative Data Collection. In *Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality* (Vol. 33). Sage Publications, Inc.
- Wardiana, I. A., & Hermanto, S. B. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Gaya Kepemimpinan, Kompetensi dan di Mediasi Motivasi Terhadap Kinerja Organisasi. *Akuntabilitas*, 12(1), 129–144.

B. JURNAL

- Ammar, F., & Bustamam, B. (2019). Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Kasus Pada Smp Negeri 3 Dan Smp Islam Ypui Darul Ulum Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 116. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10804>
- Boy, D., & Siringoringo, H. (2011). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi orang tua murid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 14(2).
- Fauziyyah, N. A., Mulyani, H., & Purnamasari, I. (2018). Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 21–28.

- Hakim, D. R., & Suhendar, D. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 17(1).
- Hidayat, R, Burhan, M. R., & Ma'ruf, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93–107.
- Helnikusdita, H. H. (2016). *Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)*. *Manajer Pendidikan*, 10(6).
- Januwarso, A. (2017). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 1–9.
- Paudel, N. R. (2009). A critical account of policy implementation theories: status and reconsideration. *Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, 25(2), 36–54.
- Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (2015). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 61–66.
- Salman, I., Warjio, W., & Isnaini, I. (2018). Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(1), 18–38.
- Silele, E., & Sabijono, H. (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Sucika, P., & Suprpta, I. N. (2018). *Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng*. *Locus*, 9(1).
- Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasan I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153-160.
- Widodo, A. P. (2020). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 48–57.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Keuangan Sekolah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pemerintah republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah Dalam Laporan Keuangan Bantuan Oprasional Sekolah Tahun Anggaran 2012*. Jakarta: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun. 2008. *Tentang Pendanaan Pendidikan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Permendikbud No 08. 2017. *Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Program Dana BOS 2017*. Jakarta: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

D. SUMBER BACAAN DARI INTERNET DAN BAHAN LAINNYA

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=060300&level=2>

<https://beritakini.co/news/kepala-sekolah-ungkap-kegelisahan-hadapi-oknum-lsm-dan-wartawan-berlagak-auditor-dan-penyidik-di-aceh-singkil/index.html>